



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SARMAN
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 443850

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.295.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/54 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/54 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000
4. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG BARAT, WARISAN Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 7500 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, WARISAN Rp. 45.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/36 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **103.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT D1B02N26L2A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **21.050.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **11.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **1.430.550.000**



III. HUTANG

Rp. 28.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.402.550.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.